



DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

LAKIP 2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024. LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah bentuk komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LAKIP ini adalah bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP Dinas Kesehatan. Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Dokumen LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja ke depan.

Polewali, Februari 2025
Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Polewali Mandar

dr. H. MUSTAMAN, M.M.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19711231 200604 1 057

RINGKASAN EKSEKUTIF

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu perangkat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengemban tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yang merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Sebagai organisasi yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar diwajibkan untuk menyusun perencanaan, pengukuran serta penilaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya agar mampu bekerja secara efektif, efisien dan produktif.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja ini yang utama adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tahun 2024 merupakan tahun dalam upaya pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2024. Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui evaluasi indikator kinerja dapat menggambarkan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kabupaten Polewali Mandar dalam pembangunan mempunyai visi RPJMD “POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA”. Visi ini dijabarkan dalam beberapa misi, tujuan, dan sasaran, di bidang kesehatan misinya adalah “Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius” dengan tujuan “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia”, serta sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan”.

Laporan kinerja ini tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritikan dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan Laporan kinerja ini dimasa yang akan datang.

Polewali, Februari 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Polewali
Mandar

dr. H. MUSTAMAN, M.M.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19711231 200604 1 057

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Gambaran Umum	3
E. Isu Strategis Perangkat Daerah	8
F. Sistematika LAKIP	10
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah	11
B. Penetapan Kinerja Tahun 2024	13
C. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
A. Akuntabilitas Kinerja	16
B. Akuntabilitas Keuangan	37
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakatseoptimal mungkin. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, untuk Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar penyelenggara pelayanan kesehatan.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati Polewali Mandar. Penyampaian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya Penetapan Kinerja tahun 2024. Disamping itu penyusunan laporan kinerja ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas KesehatanKabupaten Polewali Mandar di masa yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2024. Adapun tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi mengenai Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2024.
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja serta masukan dalam perencanaan program di Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar untuk kemudian diharapkan adanya perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar yang lebih baik di masa mendatang.
3. Menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar yang akuntabel sehingga

dapat bekerja secara efisien, efektif dan representatif serta dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dan lingkungan.

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 30);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 34);
 14. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 39);
 15. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 53).

D. Gambaran Umum

Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar merupakan unsur pelaksana urusan kesehatan. Rincian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan diuraikan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang terdiri atas :

- a. Bidang Kesehatan Masyarakat
- b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan
- d. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas :

- Kepala Dinas
- Sekretariat
- Bidang Kesehatan Masyarakat
- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Bidang Pelayanan Kesehatan
- Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Unit Pelaksana Teknis Dinas
- Kelompok Jabatan Fungsional

❖ **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

a. Tugas Pokok Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi Dinas Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan kesehatan.
2. Pelaksanaan kebijakan kesehatan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesehatan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas**

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar berpedoman pada Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan kesehatan;
- pelaksanaan kebijakan kesehatan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesehatan;
- pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
3. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
4. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
5. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
6. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
7. penyelenggaraan administrasi keuangan;

8. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
9. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
10. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas membawahi :

- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesehatan masyarakat;
- penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan kesehatan masyarakat;
- penyelenggaraan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
- penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- penyelenggaraan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan kesehatan masyarakat;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kesehatan masyarakat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi:

- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
- Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
- penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pencegahan dan pengendalian penyakit;
- penyelenggaraan surveilans dan imunisasi;
- penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

- penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- penyelenggaraan koordinasi teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :

- o Seksi Surveilans dan Imunisasi
- o Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- o Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

e. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
3. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
4. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
5. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan tradisional;
6. penyelenggaraan koordinasi teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
7. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi:

- o Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
- o Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
- o Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

f. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan

Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen sumber daya kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis manajemen sumber daya kesehatan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional manajemen sumber daya kesehatan;
3. penyelenggaraan manajemen sumber daya kefarmasian;
4. penyelenggaraan pengelolaan alat kesehatan dan PKRT;
5. penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia kesehatan;

6. penyelenggaraan koordinasi teknis manajemen sumber daya kesehatan;
7. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan manajemen sumber daya kesehatan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi:

- o Seksi Kefarmasian
- o Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
- o Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. UPT Dinas Kesehatan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan terdiri atas Instalasi Farmasi Kabupaten, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Puskesmas yang masing-masing memiliki fungsi teknis diantaranya; Instalasi Farmasi Kabupaten memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pengadaan obat dan BMHP serta menjamin ketersediaan stock obat dan BMHP yang akan didistribusikan kepada masing-masing puskesmas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan kesehatan dengan pemberian obat secara rasional kepada masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

Puskesmas juga sebagai unit pelaksana teknis yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui berbagai jenis upaya pelayanan kesehatan seperti upaya pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan.

Selain itu, Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pelayanan klinik kesehatan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan, terdiri dari sub unit pelayanan kesehatan dan sub unit pemeriksaan laboratorium Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan daerah mempunyai fungsi pelaksanaan operasional

kegiatan laboratorium yang meliputi laboratorium klinik, Mikrobiologi dan Kesehatan Lingkungan, pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengujian kesehatan serta rujukan data klinis dan laboratorium Kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas teknis laboratorium Kesehatan, dan pelaksanaan koordinasi kegiatan laboratorium kesehatan dengan sub unit kerja lainnya dalam lingkup organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.

❖ **Sumber Daya Manusia**

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 1002 orang. Dari 1002 pegawai tersebut, 952 diantaranya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), 50 orang tenaga administrasi.

❖ **Sarana dan Prasarana Kantor**

Jumlah sarana pelayanan kesehatan tahun 2024 antara lain : puskesmas sebanyak 20 unit, puskesmas pembantu sebanyak 56 unit, jumlah posyandu sebanyak 675 unit dan tersebar di 167 desa/kelurahan. Jumlah gudang farmasi sebanyak 1 unit, jumlah laboratorium kesehatan daerah sebanyak 1 unit, jumlah UTD dan PMI sebanyak 2 unit.

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan, disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkit penyakit.

Konsep penanganan kesehatan diarahkan secara promotif dan preventif. Disamping upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan, dan Rumah Sakit.

a. Upaya Kesehatan

Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2024 sebesar 190 per 100.000 kelahiran hidup. Target SDGs Tahun 2030 yakni menurunkan hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Masih tingginya Angka Kematian Ibu kemungkinan disebabkan oleh antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya.

Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2024 adalah 14,9 per 1.000 kelahiran hidup. Target SDGs Tahun 2030 yakni 12 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas standar pelayanan kesehatan pada Bayi dapat

dipenuhi secara bertahap.

Untuk penyakit menular, prioritas masih tertuju pada penyakit Tuberkulosis, HIV/AIDS, Kusta, Pneumonia Balita, Hepatitis B, dan Diare. Kecenderungan Penyakit Tidak Menular (PTM) atau Non-Communicable Disease cenderung meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. Penyakit Tidak Menular (PTM) yang dikenal juga sebagai penyakit degeneratif tidak lagi menyerang usia lanjut tetapi juga mulai terjadi pada kelompok umur produktif. Penyakit Tidak Menular (PTM) utama meliputi Hipertensi, Diabetes Melitus, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas kesehatan lingkungan juga cenderung menunjukkan keberhasilan. Tetapi masih perlu terus diupayakan keberlanjutan program dan kegiatannya untuk mewujudkan kesehatan masyarakat terutama kualitas kesehatan lingkungan yang setinggi-tingginya.

Gangguan jiwa dan penyalahgunaan Napza merupakan masalah kesehatan yang juga menjadi fokus pembangunan kesehatan. Keduanya berkaitan dengan masalah perilaku yang dapat membahayakan diri. Prioritas untuk kesehatan jiwa dan penyalahgunaan Napza adalah masyarakat, untuk mencegah meningkatnya gangguan jiwa dan penyalahgunaan Napza.

b. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari pelayanan dasar meliputi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes, dan pelayanan rujukan Rumah Sakit, secara rasio dan wilayah Kabupaten Polewali Mandar belum memenuhi standar ideal.

Yang menjadi permasalahan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan adalah prasarana yang mendukung seperti kondisi jalan dan transportasi yang belum memadai. Dari sisi kualitas pelayanan juga masih belum optimal, disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia kesehatan yang ada.

c. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase rumah tangga ber-PHBS, capaian Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 adalah 70% RT ber-PHBS. Cakupan desa siaga aktif pada tahun 2024 sebesar 100% dari 167 desa/kelurahan siaga yang ada.

Perilaku merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan. Maka promosi kesehatan merupakan intervensi strategis dalam memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, terkait dengan upaya kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

d. Sumber Daya Kesehatan

Upaya pembangunan kesehatan belum optimal dalam memberdayakan seluruh potensi sumber daya sehubungan dengan masih adanya sarana pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan kelengkapan alat medis yang masih kurang. Akses yang belum menjangkau seluruh

masyarakat dan pelayanan kesehatan yang belum maksimal, serta budaya hidup sehat belum tersebar merata ke masyarakat juga masih menjadi hal yang menghambat dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Profesionalisme tenaga kesehatan dan manajemen perencanaan pembangunan kesehatan secara fungsi belum optimal. Kemampuan aparatur dalam menjalankan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan ditinjau dari aspek mutu masih perlu ditingkatkan.

Hal lain yang menjadi kendala keterbatasan adalah pembiayaan kesehatan, belum efektif dan efisien. Masyarakat miskin masih banyak yang belum memiliki jaminan kesehatan, baik yang dijamin oleh pemerintah pusat maupun daerah. Serta belum didukung dengan Sistem Informasi Komunikasi yang terintegrasi. Dukungan serta komitmen Pemerintah Daerah dan legislatif yang memungkinkan regulasi pembangunan kesehatan lebih terarah dan baik, sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau.

F. Sistematika LAKIP

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Gambaran Umum
- E. Isu Strategis Perangkat Daerah
- F. Sistematika LAKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2024
- C. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja
- B. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah

Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar diartikan sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dan bersifat indikatif.

Berdasarkan hasil review dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar perlu segera melakukan revisi dokumen Renstra karena beberapa alasan, antara lain : (1) Adanya perubahan kebijakan nasional seiring dengan terbitnya RPJM Nasional, dimana RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 di-Perda-kan sebelum terbitnya RPJM Nasional; (2) Adanya perubahan metode pengukuran beberapa indikator kinerja utama, seperti PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan IPM yang berdampak terhadap penetapan target kinerja; (3) Adanya penambahan atau perubahan indikator kinerja akibat terjadinya perubahan konsep, seperti angka Harapan Lama Sekolah, PNB perkapita, dan sebagainya; (4) Adanya sejumlah indikator kinerja pembangunan nasional yang seyogyanya diakomodir di dalam dokumen RPJMD.

Tahun 2016 terdapat perkembangan kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, sehingga dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut melalui perubahan struktur kelembagaan di Kabupaten Polewali Mandar, termasuk Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu bagian dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang mengharuskan perubahan atau revisi dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian visi dan implementasi misi, maka dirumuskan sejumlah tujuan serta sasaran dan Indikator Sasaran Renstra. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi serta merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan, bersifat idealis dan mempunyai jangkauan kedepan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, serta didasarkan pada isu-isu stratejik.

Mengacu pada pernyataan visi dan rumusan misi pemerintah daerah yang telah disusun, yaitu:

Visi : Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera

Misi : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah meningkatnya derajat kesehatan.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan strategis.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan, yaitu : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat.

Indikator Kinerja

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator sasaran adalah ukuran keberhasilan dari sasaran untuk mencapai tujuan. Adapun indikator dari sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Angka Kematian Ibu
2. Angka Kematian Bayi
3. Angka Kesakitan Penyakit Menular TB
4. Angka Kesakitan Penyakit Menular HIV/AIDS
5. Angka Kesakitan Penyakit Menular Kusta
6. Angka Kesakitan Penyakit Menular Pneumonia Balita
7. Angka Kesakitan Penyakit Menular Hepatitis B
8. Angka Kesakitan Penyakit Menular Diare
9. Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Hipertensi
10. Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Diabetes Melitus
11. Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
12. Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi
13. Prevalensi Stunting
14. Persentase Masyarakat yang Memperoleh Jaminan Kesehatan

Strategi

Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai sasaran strategis utama yaitu peningkatan status pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan

kelangsungan hidup, dengan sasaran :

1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,82 tahun.
2. Menurunkan angka kematian bayi di bawah 12 per 1000 kelahiran hidup.
3. Menurunkan angka kematian ibu dari 190 per 100.000 kelahiran hidup.
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang
5. Meningkatkan cakupan imunisasi lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi 100%.
6. Menurunkan angka kesakitan secara signifikan pada semua kasus penyakit dan efektifnya pencegahan dan penanggulangan kasus penyakit menular.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, berdasarkan Rencana Strategis, kemampuan APBD dan kemampuan sumber daya lainnya. Tujuan dilakukan Penetapan Kinerja ada 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diterapkannya penetapan kinerja adalah intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel. Sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah bersama jajaran Satuan Kerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	CAPAIAN 2024
1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	186 per 100.000 Kelahiran Hidup	168 per 100.000 Kelahiran Hidup	190 per 100.000 Kelahiran Hidup
		Angka Kematian Bayi	10,7 per 1.000 Kelahiran Hidup	11 per 1.000 Kelahiran Hidup	14,9 per 1.000 Kelahiran Hidup
		Angka kesakitan penyakit menular TB	314 per 100.000 Penduduk	204 per 100.000 Penduduk	280 per 100.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit menular HIV/AIDS	0,06 per 1.000 Penduduk	0 per 1.000 Penduduk	0,12 per 1.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit menular Kusta	1,63 per 10.000 Penduduk	1 per 10.000 Penduduk	1,51 per 10.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit menular Pneumonia Balita	11 per 1.000 Balita	2 per 1.000 Balita	26 per 1.000 Balita

		Angka kesakitan penyakit menular Hepatitis B	22 per 100.000 Penduduk	1 per 1.000 Penduduk	21 per 100.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit menula Diare	17 per 1.000 Penduduk	20 per 1.000 Penduduk	19 per 1.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit tidak menular Hipertensi	38 per 1.000 Penduduk	64 per 1.000 Penduduk	39 per 1.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit tidak menular Diabetes Melitus	10 per 1.000 Penduduk	13 per 1.000 Penduduk	8,2 per 1.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit tidak menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	2 per 1.000 Penduduk	0,1 per 1.000 Penduduk	1,7 per 1.000 Penduduk
		Prevalensi penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	64,90%	90%	70,52%
		Prevalensi Stunting	22,03%	15,6%	21,4%
		Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	99,76%	98%	102%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	B	BB	
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	95,56%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Sangat Baik	Baik

C. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

1. simkinerja2022.polmankab.go.id merupakan aplikasi sim-kinerja berkaitan dengan implementasi SAKIP.



2. e-renggar.kemkes.go.id/login merupakan aplikasi yang digunakan untuk perencanaan dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kemenkes.



3. polmankab.krisna.systems merupakan aplikasi yang digunakan untuk perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bappenas.



4. <https://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/lapordjpk/> merupakan aplikasi yang digunakan untuk pelaporan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kemenkeu.



5. <https://dinaskesehatan.polmankab.go.id/> merupakan instrumen yang mendukung upaya keterbukaan publik melalui berbagai informasi dan laporan yang disajikan kepada masyarakat.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	CAPAIAN 2024
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,82 Tahun	62,95 Tahun	71,08 Tahun
		Angka Kematian Ibu (AKI)	186 per 100.000 Kelahiran Hidup	168 per 100.000 Kelahiran Hidup	190 per 100.000 Kelahiran Hidup
		Angka Kematian Bayi (AKB)	10,7 per 1.000 Kelahiran Hidup	11 per 1.000 Kelahiran Hidup	14,9 per 1.000 Kelahiran Hidup
		Angka kesakitan penyakit menular TB	314 per 100.000 Penduduk	204 per 100.000 Penduduk	280 per 100.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit menular HIV/AIDS	0,06 per 1.000 Penduduk	0 per 1.000 Penduduk	0,12 per 1.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit menular Kusta	1,63 per 10.000 Penduduk	1 per 10.000 Penduduk	1,51 per 10.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit menular Pneumonia Balita	11 per 1.000 Balita	2 per 1.000 Balita	26 per 1.000 Balita
		Angka kesakitan penyakit menular Hepatitis B	22 per 100.000 Penduduk	1 per 1.000 Penduduk	21 per 100.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit menular Diare	17 per 1.000 Penduduk	20 per 1.000 Penduduk	19 per 1.000 Penduduk
		Angka kesakitan penyakit tidak menular Hipertensi	38 per 1.000 Penduduk	64 per 1.000 Penduduk	39 per 1.000 Penduduk

	Angka kesakitan penyakit tidak menular Diabetes Melitus	10 per 1.000 Penduduk	13 per 1.000 Penduduk	8,2 per 1.000 Penduduk
	Angka kesakitan penyakit tidak menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	2 per 1.000 Penduduk	0.1 per 1.000 Penduduk	1,7 per 1.000 Penduduk
	Prevalensi penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	64,90%	90%	70,52%
	Prevalensi Stunting	22,03%	15,6%	21,4%
	Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	99,76%	98%	102%

Pada tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 namun masih ada beberapa indikator belum mencapai target yaitu Angka Kesakitan Penyakit Menular TB, Kusta, Hepatitis B, Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi, dan Prevalensi Stunting. Indikator yang menjadi permasalahan dan masih menunjukkan angka yang cukup tinggi terutama pada indikator Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, HIV/AIDS, Pneumonia Balita.

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.2.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran I

INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Angka Kematian Ibu (AKI)	168 per 100.000 KH	190 per 100.000 KH
Angka Kematian Bayi (AKB)	11 per 1.000 KH	14,9 per 1.000 KH
Angka kesakitan penyakit menular TB	204 per 100.000 Penduduk	280 per 100.000 Penduduk
Angka kesakitan penyakit menular HIV/AIDS	0 per 1.000 Penduduk	0,12 per 1.000 Penduduk
Angka kesakitan penyakit menular Kusta	1 per 10.000 Penduduk	1,51 per 10.000 Penduduk
Angka kesakitan penyakit menular Pneumonia Balita	2 per 1.000 Balita	26 per 1.000 Balita
Angka kesakitan penyakit menular Hepatitis B	1 per 1.000 Penduduk	21 per 100.000 Penduduk
Angka kesakitan penyakit menular Diare	20 per 1.000 Penduduk	19 per 1.000 Penduduk
Angka kesakitan penyakit tidak menular Hipertensi	64 per 1.000 Penduduk	39 per 1.000 Penduduk
Angka kesakitan penyakit tidak menular Diabetes Melitus	13 per 1.000 Penduduk	8,2 per 1.000 Penduduk
Angka kesakitan penyakit tidak menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	0,1 per 1.000 Penduduk	1,7 per 1.000 Penduduk
Prevalensi penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	90%	70,52%
Prevalensi Stunting	15,6%	21,4%
Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	98%	102%

Pada tabel 3.2.1 dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2024 menunjukkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan Penyakit Menular HIV/AIDS; Pneumonia Balita; Hepatitis B, Prevalensi Stunting, dan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat masih tinggi, sedangkan untuk Angka Kesakitan Penyakit Menular TB; Kusta; Diare, Prevalensi penduduk lanjut usia risiko tinggi sudah mendekati target yang ditentukan, Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Hipertensi; Diabetes Melitus sudah memenuhi atau di bawah target yang ditentukan, Persentase Masyarakat yang memperoleh jaminan Kesehatan melampaui target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Tahun-Tahun Sebelumnya

- Angka Kematian Ibu

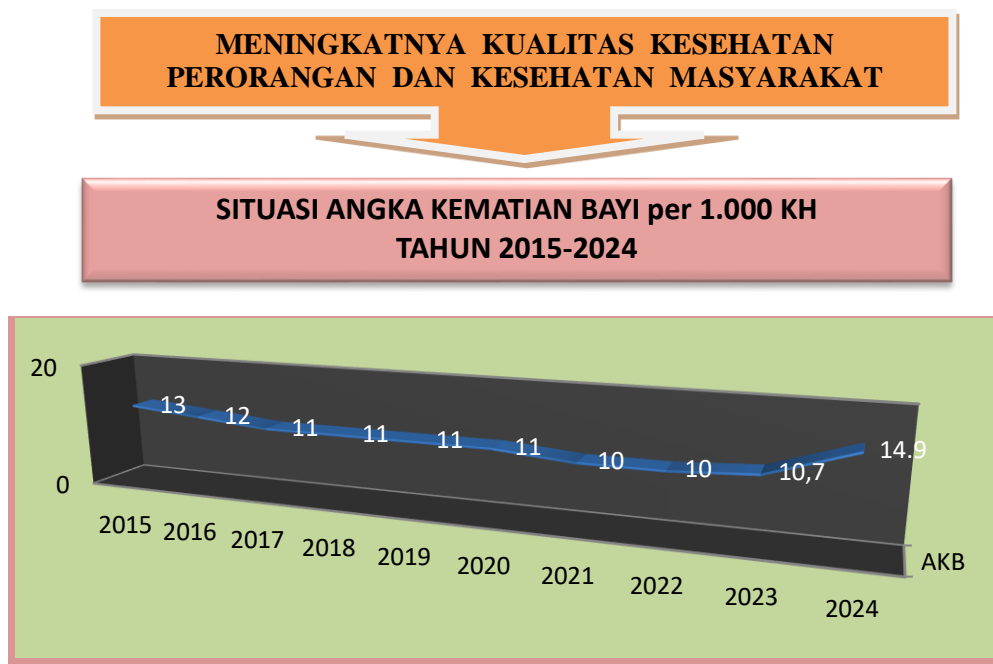


Sumber : Program KIA Dinkes Kab. Polman, 2024

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu.

Grafik di atas menggambarkan trend angka kematian ibu mengalami penurunan dalam rentang waktu tahun 2015 hingga tahun 2017, namun terjadi peningkatan hingga mencapai AKI 300 per 100.000 kelahiran hidup, atau dengan kata lain setiap 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Polewali Mandar terdapat 300 kematian maternal (ibu). Tahun 2020 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Polewali Mandar mengalami penurunan signifikan hingga 140 per 100.000 Kelahiran Hidup. Tahun 2021 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan yaitu 180 per 100.000 Kelahiran Hidup. Tahun 2022 Angka Kematian Ibu mengalami penurunan hingga 147 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, pada tahun 2023 mengalami peningkatan melebihi dari tahun 2021 sebesar 186 per 100.000 Kelahiran Hidup. Tahun 2024 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 190 per 100.000 Kelahiran Hidup.

- **Angka Kematian Bayi**

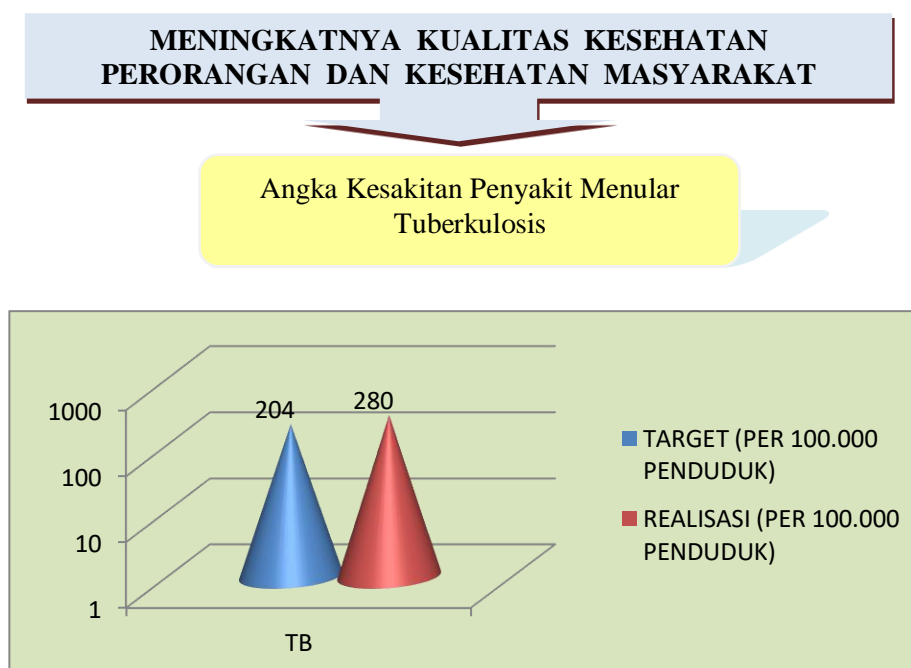


Sumber : Program KIA Dinkes Kab. Polman, 2024

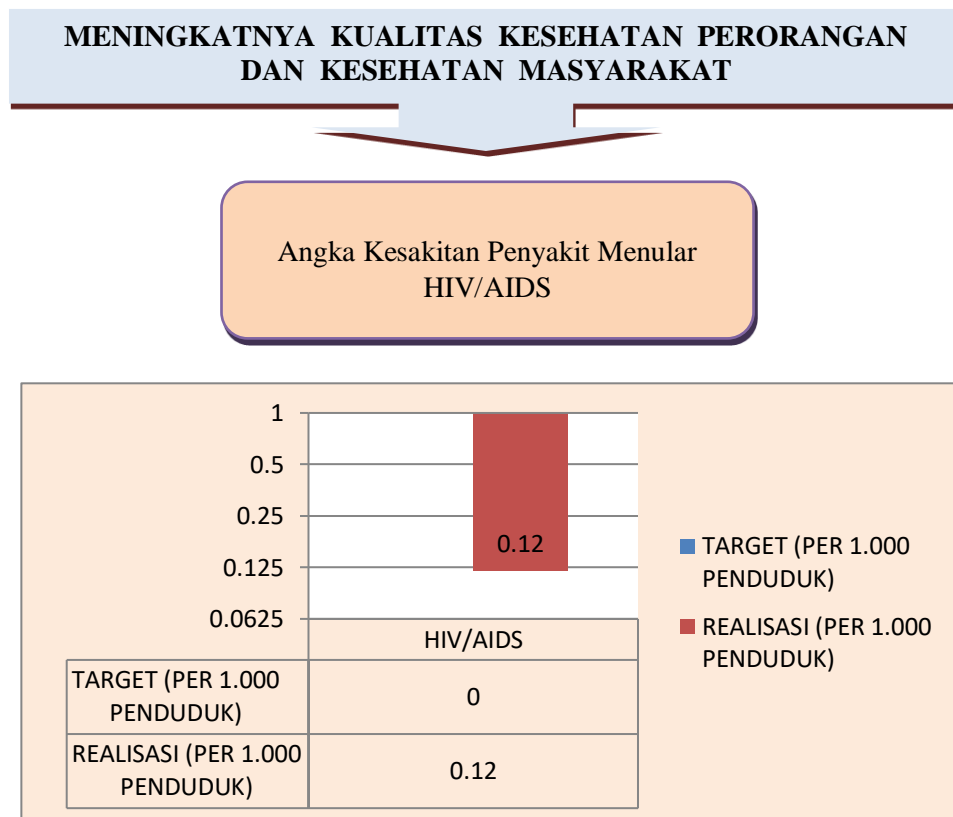
Menurut WHO (World Health Organization) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 0-11 bulan per 1000 kelahiran hidup.

Hingga tahun 2030 dalam Sustainable Development Goals menargetkan penurunan Angka Kematian Bayi hingga 12 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan target perjanjian kinerja tahun 2024, Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Target yang dicapai sebesar 14,9 per 1000 kelahiran hidup.

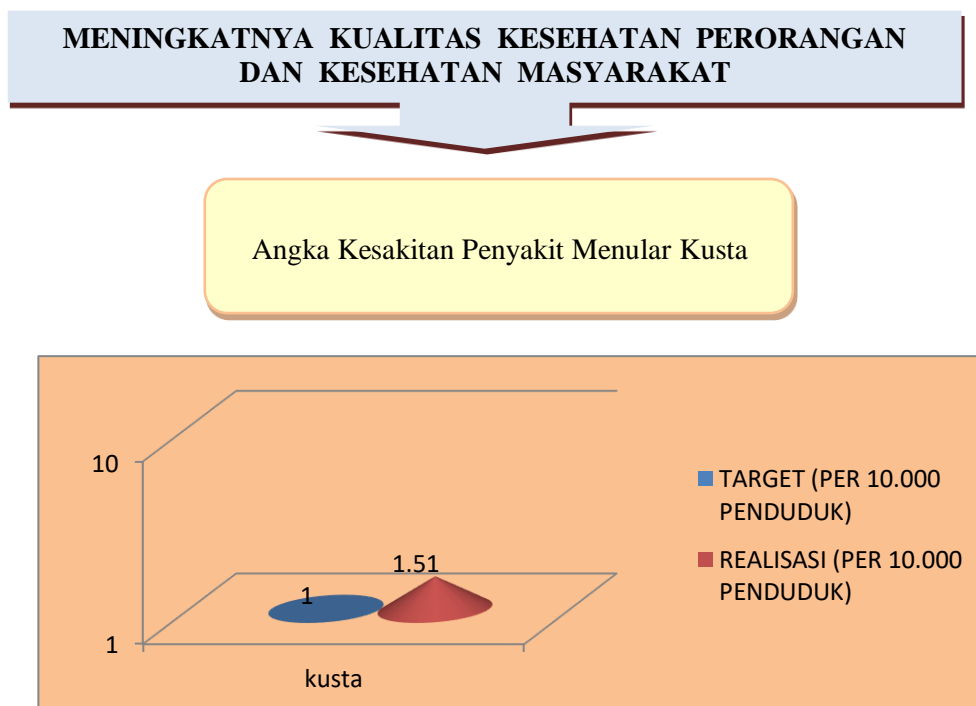
- **Angka Kesakitan Penyakit Menular Tuberkulosis**



- **Angka Kesakitan Penyakit Menular HIV/AIDS**



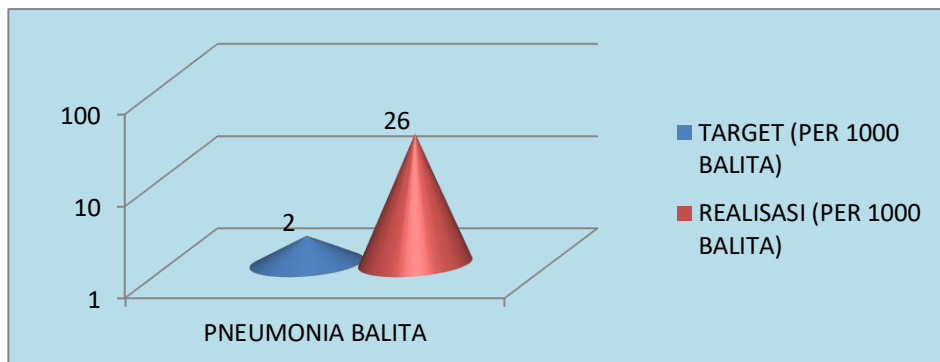
- **Angka Kesakitan Penyakit Menular Kusta**



- **Angka Kesakitan Penyakit Menular Pneumonia Balita**

**MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN
DAN KESEHATAN MASYARAKAT**

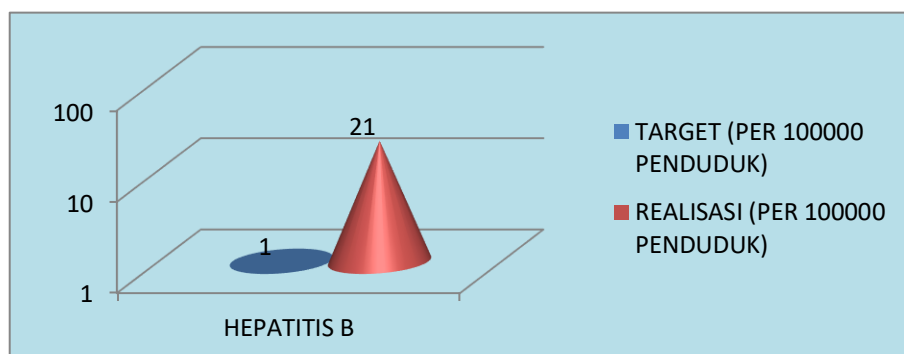
Angka Kesakitan Penyakit Menular
Pneumonia Balita



- **Angka Kesakitan Penyakit Menular Hepatitis B pada Ibu Hamil**

**MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN
DAN KESEHATAN MASYARAKAT**

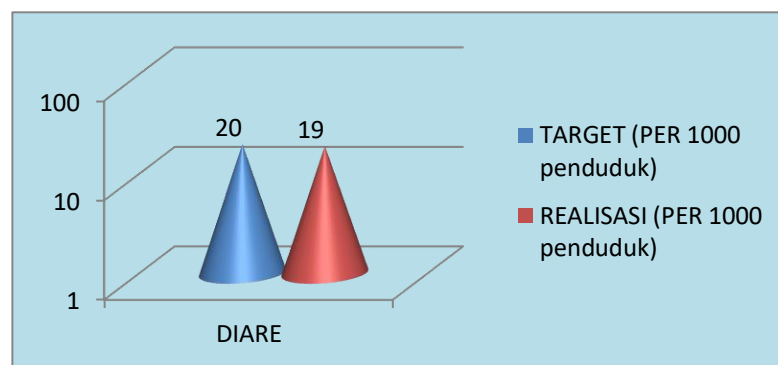
Angka Kesakitan Penyakit Menular Hepatitis B
pada Ibu Hamil



- **Angka Kesakitan Penyakit Menular Diare**

**MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN
DAN KESEHATAN MASYARAKAT**

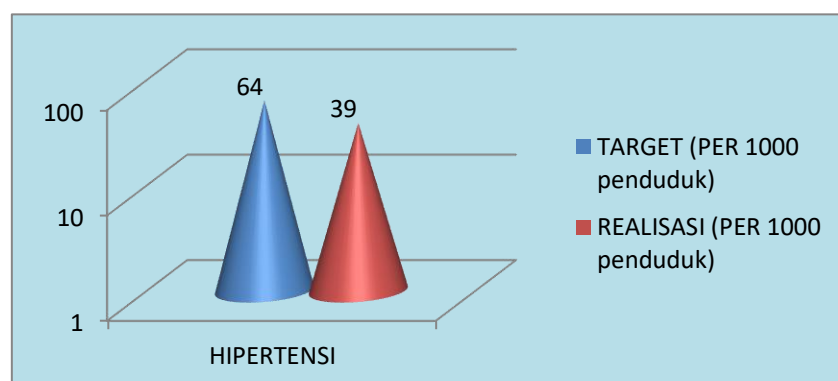
Angka Kesakitan Penyakit Menular
Diare



- **Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Hipertensi**

**MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN
DAN KESEHATAN MASYARAKAT**

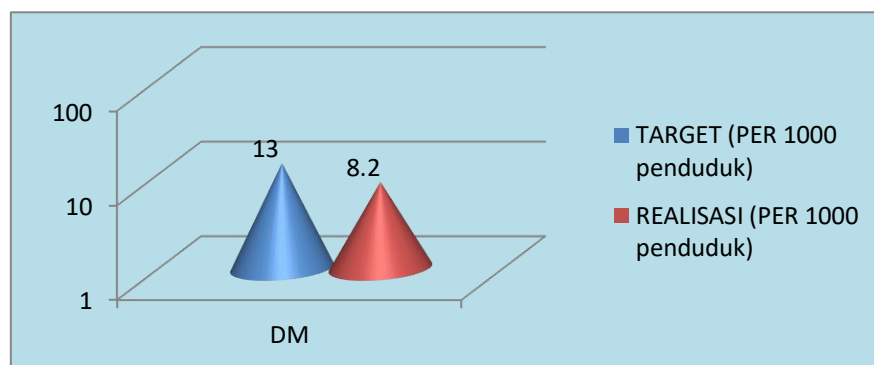
Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular
Hipertensi



- **Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Diabetes Mellitus**

**MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN
DAN KESEHATAN MASYARAKAT**

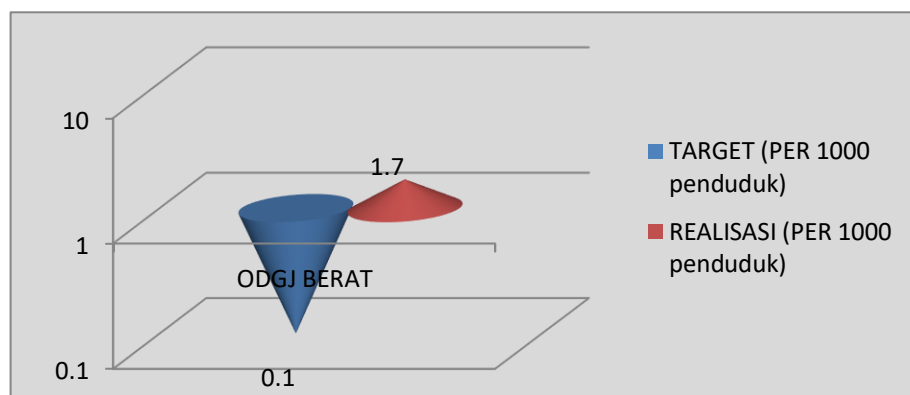
Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular
Diabetes Mellitus



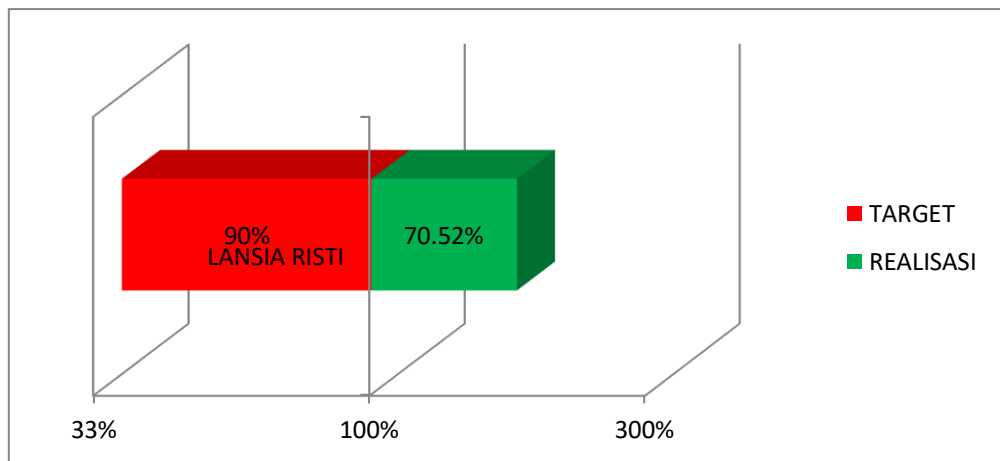
- **Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**

**MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN
DAN KESEHATAN MASYARAKAT**

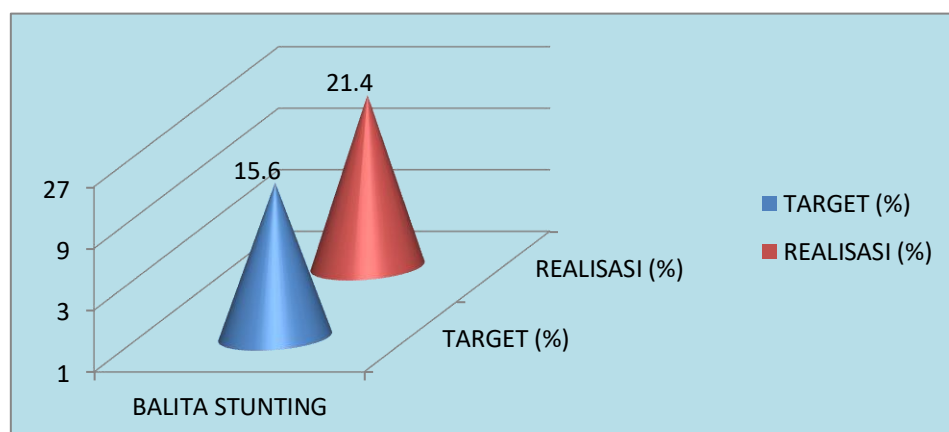
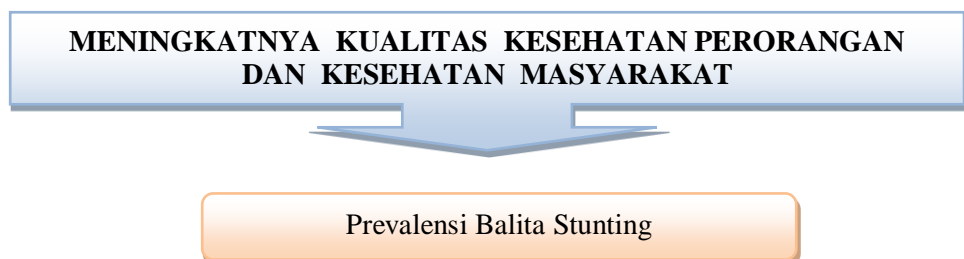
Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular
Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat



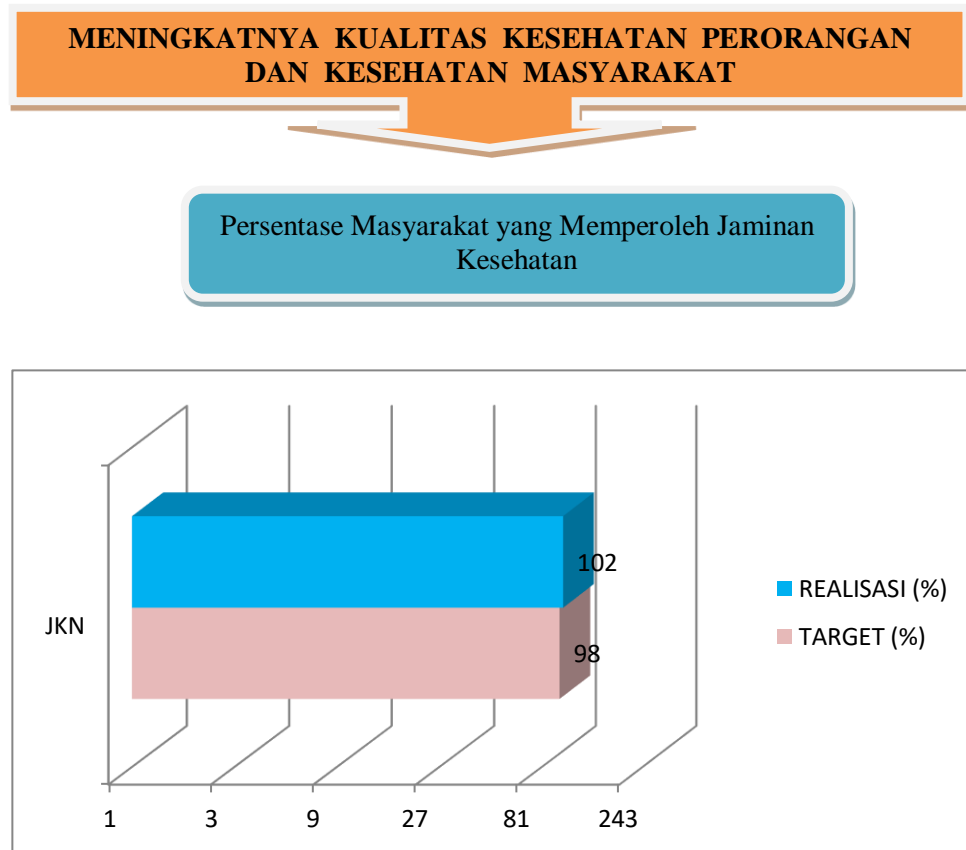
- **Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi**



- **Prevalensi Balita Stunting**



- **Persentase Masyarakat yang Memperoleh Jaminan Kesehatan**



c. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, dan Solusi yang Dilakukan

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan pada tahun 2024, dalam proses perjalanannya, beberapa indikator penunjang Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi ini belum maksimal dan masih memiliki hambatan, antara lain : beberapa daerah masih memiliki jarak tempuh yang jauh untuk sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas Antenatal Care masih sangat rendah, penanganan komplikasi obstetri masih sangat rendah, tingginya angka BBLASR, serta Aplikasi MPDN mencatat kematian ibu dan kematian bayi sesuai alamat KTP sehingga ibu dan bayi yang meninggal meskipun tidak mendapat pelayanan di daerah tersebut tetap masuk ke dalam daftar jumlah kematian di tempat tersebut. Solusi yang dilakukan antara lain : melakukan edukasi tentang pentingnya Antenatal Care, melakukan advokasi kepada pemerintah desa, agar Alokasi Dana Desa sebagian digunakan untuk mengadakan kendaraan atau sewa kendaraan ibu hamil yang akan ke fasilitas pelayanan Kesehatan, peran petugas kesehatan dalam penanganan persalinan, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Kesehatan, meningkatkan peran lintas sektor dan lintas program dalam upaya pelayanan kesehatan ibu hamil, melakukan pengawasan sistem pencatatan dan pelaporan.

Prevalensi stunting tahun 2024 mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan karena telah melakukan kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting, melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat, program kegiatan untuk mengintervensi penurunan prevalensi stunting sudah melibatkan lintas sektor.

Angka kesakitan penyakit menular HIV/AIDS, Pneumonia Balita, dan Diare tahun 2024 masih mengalami peningkatan karena intervensi program kegiatan menemui kendala antara lain masih kurangnya distribusi RDT HIV ke kabupaten, rendahnya kesadaran untuk skrining HIV terutama pada populasi kunci. Solusi yang dilakukan antara lain terlaksananya kegiatan VCT Mobile Program HIV.

Angka kesakitan penyakit menular Tuberkulosis, Kusta, Hepatitis B tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, keberhasilan tersebut didukung oleh pelayanan Kesehatan dan perbaikan tata laksana program yang dilakukan secara terintegrasi.

Angka kesakitan penyakit tidak menular Hipertensi tahun 2024 mengalami peningkatan dan angka kesakitan penyakit tidak menular Diabetes Melitus menurun namun masih di bawah target yang ditetapkan. Angka kesakitan penyakit tidak menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat mengalami penurunan namun belum mencapai target yang ditentukan karena dibutuhkan keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatannya.

Prevalensi penduduk lanjut usia risiko tinggi tahun 2024 mengalami peningkatan dikarenakan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut dilakukan penguatan upaya kesehatan usia lanjut, peningkatan kapasitas pengelola program, orientasi pelayanan kesehatan lansia dan geriatrik bagi petugas puskesmas.

Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian melebihi target yang ditetapkan, hal tersebut dikarenakan pemerintah memberikan perlindungan jaminan kesehatan melalui *Universal Health Coverage (UHC)*.

Kondisi tersebut menggambarkan secara umum keadaan status kesehatan masyarakat di suatu wilayah menjadi penilaian bahwa pembangunan kesehatan masih perlu ditingkatkan baik dari segi upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara kuantitas dan kualitas serta pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan di fasilitas kesehatan primer maupun sekunder, selain itu peran aktif kerja sama lintas sektor secara kelembagaan untuk serta bersama-sama berkomitmen melakukan upaya pembangunan kesehatan secara terintegrasi dari segi implementasi program perlu digalakkan.

d. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan didukung oleh perbaikan tata laksana program kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dan fokus pada sasaran dengan melibatkan fasilitas kesehatan primer dan jaringannya sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Program dan Kegiatan terkait pencapaian sasaran ini adalah :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Operasional Pelayanan Puskesmas
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
		Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) PSC-118
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

e. Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran)

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi
		Rp	Rp
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana, dan prasarana dan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	152.127.598.218	82.335.294.105
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	20.820.088.583	16.551.460.921
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10.285.877.800	10.201.616.046
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang	231.563.568	228.063.568

	Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.246.020.000	2.479.072.734
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	831.265.760	815.804.000
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pemeliharaan rutin dan berkala	62.549.000	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman yang disediakan	6.099.175.255	2.792.717.373
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman yang didistribusi ke fasilitas kesehatan	63.637.200	34.187.200
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kabupaten	131.062.333.217	65.679.828.019
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	211.027.000	129.396.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	226.001.000	116.812.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	276.444.000	243.936.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.000.500	82.056.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99.999.680	76.991.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.024.100	85.644.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	149.463.490	35.932.300

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99.999.800	98.169.336
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	473.445.460	81.676.096
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Sesuai Standar	99.999.800	52.870.402
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	570.628.990	68.234.773
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99.999.966	87.350.186
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	231.256.384	128.279.460
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	201.793.526	30.933.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	570.068.466	429.989.200
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	320.413.000	206.956.494
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan	97.783.140	96.626.140
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.053.121.316	500.155.052
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	103.978.349.934	61.899.471.799
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	19.708.631.648	46.839.130
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.545.280.000	867.843.375
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	209.823.566	13.335.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	89.129.100	63.647.600

Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	49.999.765	45.659.713
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	313.227.606	149.025.490
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	111.623.980	41.996.273
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	74.798.000	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Tipe C dan D yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	245.176.418	104.005.165
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang ditingkatkan tata kelola	49.823.480	36.413.365
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	117.048.738	42.575.300
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	78.304.200	25.016.500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga medis yang memenuhi standar kompetensi	4.596.980.470	3.926.129.781
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga medis yang memenuhi standar kompetensi	3.365.009.400	2.777.684.569
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	3.365.009.400	2.777.684.569
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berSTR (Tenaga Medis)	1.231.971.070	1.148.445.212
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.231.971.070	1.148.445.212

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Alat Kesehatan)	423.053.750	368.392.695
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga produk makanan dan minuman yang memiliki izin	423.053.750	368.392.695
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	423.053.750	368.392.695
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	708.028.740	545.076.630
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan Rumah Tangga ber PHBS	214.516.040	175.936.660
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	164.954.840	140.041.660
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	49.561.200	35.895.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan UKBM	493.512.700	369.139.970
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	493.512.700	369.139.970

3.2.2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.2.2.a
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II

INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	
Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	95,56%	100%
Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Baik

Pada tabel 3.2.2.a dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2024 menunjukkan persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah sebesar 100% melebihi target yang ditentukan, dan indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah yaitu baik.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.2.2.b
Capaian Tahun Lalu dan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Predikat SAKIP perangkat daerah	B	B	B	
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%	100%	100%
3	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Baik	Baik	Baik

Dari tabel 3.2.2.b disimpulkan bahwa masing-masing indikator kinerja dari tahun 2021 hingga tahun 2024 menunjukkan capaian yang sama yaitu SAKIP perangkat daerah dengan predikat B, persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah 100%, dan indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah yaitu baik.

c. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, dan Solusi yang Dilakukan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencana, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Hasil evaluasi Inspektorat atas implementasi SAKIP menunjukkan Dinas Kesehatan memperoleh predikat B (Baik), belum mencapai target yang ditentukan yaitu BB. Dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan

capaian kinerja telah melakukan perbaikan yang berorientasi hasil namun perlu dilakukan monitoring pencapaian target secara berkala dan tertib. Solusi yang dilakukan adalah melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja, menguatkan komitmen agar seluruh staf mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik.

Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah yang didapat Dinas Kesehatan menunjukkan 100% melebihi dari target yang ditentukan, artinya Dinas Kesehatan telah tertib, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain pelaporan monitoring dan evaluasi anggaran, pelaporan keuangan akhir tahun, pelaporan pajak dan retribusi daerah, serta pelaporan aset daerah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perangkat daerah. IKM didapatkan dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Aktivitas layanan survey kepuasan pengguna pelayanan publik pada Dinas Kesehatan dalam penerapannya melalui Kuesioner Survey kepada Pemohon pengguna layanan publik atas pelayanan yang telah diberikan. Secara umum, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang didapatkan Dinas Kesehatan sudah bagus. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan periode Januari-Juni tahun 2024 adalah 84,30 (Baik), belum mencapai target yang ditentukan yaitu Sangat Baik. Hal ini disebabkan karena dari 9 unsur pelayanan, ada unsur yang perlu mendapat perhatian yaitu waktu pelayanan. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh penerima layanan dalam hal pengambilan data karena penanggung jawab program sementara tugas luar (perjalanan dinas). Solusi yang dilakukan adalah pengguna layanan dapat berkomunikasi dengan penanggung jawab program via *WhatsApp* terkait data yang dibutuhkan.

d. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan didukung oleh perbaikan tata laksana program kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dan fokus pada sasaran.

Program dan Kegiatan terkait pencapaian sasaran ini adalah :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

		Undangan
		Penyediaan Bahan/Material
		Fasilitas Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

e. Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran)

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi
		Rp	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	61.753.413.499	61.482.340.960
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	61.210.238	48.651.191
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.473.768	16.368.020
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.042.780	18.735.787
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.693.690	13.547.384
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun	61.074.862.709	60.911.149.208
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	60.500.289.154	60.381.333.408
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	524.300.000	480.750.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.273.555	49.065.800
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	4.408.800	1.905.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.408.800	1.905.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	7.733.800	0

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.733.800	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum yang disusun	364,091,200	295.464.982
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	5.337.560	5.299.373
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	95.463.340	78.962.495
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	7.372.620	6.642.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19.592.000	19.451.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.657.890	7.405.816
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3.196.800	3.180.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	28.810.050	28.799.950
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.568.480	9.644.291
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Disediakan	140.552.568	136.080.057
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.806.180	150.750.230
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	185.806.180	150.750.230
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	99.840.464	74.420.349
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	65.947.784	50.102.279
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18.703.500	9.207.260
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15.189.180	15.110.810

B. Akuntabilitas Keuangan

Pagu Anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 adalah Rp219.609.074.677,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 5 program, 15 kegiatan, dan 64 sub kegiatan.

Data Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebagai berikut :

Pagu Anggaran DPA Perubahan Tahun 2024	Rp219.609.074.677,00
Realisasi Anggaran Tahun 2024	Rp196.157.160.155,00
Persentase Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024	89,32%

Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Rp
		Rp	Rp	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	61.753.413.499	61.482.340.960	99,56
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tingkat Daerah yang disusun	61.210.238	48.651.191	79,48
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	24.473.768	16.368.020	66,88
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	21.042.780	18.735.787	89,04
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	15.693.690	13.547.384	86,32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun	61.074.862.709	60.911.149.208	99,73
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	60.500.289.154	60.381.333.408	99,80
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	524.300.000	480.750.000	91,69

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	50.273.555	49.065.800	97,60
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	4.408.800	1.905.000	43,21
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4.408.800	1.905.000	43,21
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	7.733.800	0	0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dilakukan monev, evaluasi dan penilaian kerja sesuai standar dan tepat waktu	7.733.800	0	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	319.551.308	295.464.982	92,46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	5.337.560	5.299.373	99,28
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	95.463.340	78.962.495	82,71
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	7.372.620	6.642.000	90,09
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19.592.000	19.451.000	99,28
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	7.657.890	7.405.816	96,71
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang tersedia	3.196.800	3.180.000	99,47
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	28.810.050	28.799.950	99,96
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang dilayani	11.568.480	9.644.291	83,37
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Disediakan	140.552.568	136.080.057	96,82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	185.806.180	150.750.230	81,13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	185.806.180	150.750.230	81,13

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	99.840.464	74.420.349	74,54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	65.947.784	50.102.279	75,97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18.703.500	9.207.260	49,23
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15.189.180	15.110.810	99,48
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana, dan prasarana dan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	152.127.598.218	82.335.294.105	54,12
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	20.820.088.583	16.551.460.921	79,50
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10.285.877.800	10.201.616.046	99,18
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	231.563.568	228.063.568	98,49
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	3.246.020.000	2.479.072.734	76,37
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	831.265.760	815.804.000	98,14
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pemeliharaan rutin dan berkala	62.549.000	0	0,00

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman yang disediakan	6.099.175.255	2.792.717.373	45,79
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman yang didistribusi ke fasilitas kesehatan	63.637.200	34.187.200	53,72
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kabupaten	131.062.333.217	65.679.828.019	50,11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	211.027.000	129.396.200	61,32
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas kategori miskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	226.001.000	116.812.400	51,69
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	276.444.000	243.936.000	88,24
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Anak Balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	100.000.500	82.056.600	82,06
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	99.999.680	76.991.000	76,99
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.024.100	85.644.400	85,62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	149.463.490	35.932.300	24,04

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penduduk dengan hipertensi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	99.999.800	98.169.336	98,17
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penduduk dengan diabetes melitus yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	473.445.460	81.676.096	17,25
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang diberikan pelayanan kesehatan standar	99.999.800	52.870.402	52,87
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah penduduk terduga TB yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	570.628.990	68.234.773	11,96
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah penduduk berisiko terkena HIV/AIDS yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	99.999.966	87.350.186	87,35
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	231.256.384	128.279.460	55,47
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	201.793.526	30.933.600	15,33
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	570.068.466	429.989.200	75,43
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	320.413.000	206.956.494	64,59
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan	97.783.140	96.626.140	98,82
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.053.121.316	500.155.052	47,49
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	103.978.349.934	93.538.746.524	89,96
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	19.708.631.648	15.907.490.389	80,71
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.545.280.000	867.843.375	56,16

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	209.823.566	13.335.000	6,36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	89.129.100	63.647.600	71,41
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	49.999.765	45.659.713	91,32
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	313.227.606	149.025.490	47,58
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	111.623.980	41.996.273	37,62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	74.798.000	0	0,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Tipe C dan D yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	245.176.418	104.005.165	42,42
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer	49.823.480	36.413.365	73,08
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	117.048.738	42.575.300	36,37
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	78.304.200	25.016.500	31,95
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga medis yang memenuhi standar kompetensi	4.596.980.470	3.926.129.781	85,41
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan	Persentase tenaga medis yang memenuhi standar kompetensi	3.365.009.400	2.777.684.569	82,55

Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	3.365.009.400	2.777.684.569	82,55
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berSTR (Tenaga Medis)	1.231.971.070	1.148.445.212	93,22
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.231.971.070	1.148.445.212	93,22
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Alat Kesehatan)	423.053.750	368.392.695	87,08
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga produk makanan dan minuman yang memiliki izin	423.053.750	368.392.695	87,08
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	423.053.750	368.392.695	87,08
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	708.028.740	545.076.630	76,99

Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan Rumah Tangga ber PHBS	214.516.040	175.936.660	82,02
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	164.954.840	140.041.660	84,90
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	49.561.200	35.895.000	72,43
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan UKBM	493.512.700	369.139.970	74,80
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	493.512.700	369.139.970	74,80

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tujuan utama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Laporan kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali dan juga sebagai alat penilai kualitas kinerja serta alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance).

Dinas Kesehatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai 4 (empat) bidang dan 1 (satu) Sekretariat, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian, telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang kompeten.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Kesehatan untuk tahun-tahun berikutnya.

4.2 Saran

Laporan ini tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritikan dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan laporan kinerja ini di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS KESEHATAN

Jl. Hj. Andi Depu Nomor 2 Polewali, Kode Pos 91311
Telepon : (0428) 2410798 Faks : (0428) 2410998
Website : <http://dinkes.polewalimandarkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **dr. H. Mustaman, M.M.Kes., DPK**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Drs. Muhammad Ilham Borahima**
Jabatan : Pj. Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Polewali Mandar,

Polewali, 23 Februari 2024
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kesehatan,

Drs. Muhammad Ilham Borahima

dr. H. Mustaman, M.M.Kes., DPK
NIP : 19711231 200604 1 057

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI
MANDAR

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	186 per 100.000 Kelahiran Hidup	168 per 100.000 Kelahiran Hidup
		Angka Kematian Bayi	10,7 per 1.000 Kelahiran Hidup	11 per 1.000 Kelahiran Hidup
		Angka Kesakitan Penyakit Menular TB	314 per 100.000 Penduduk	204 per 100.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Menular HIV/AIDS	0,06 per 1.000 Penduduk	0 per 1.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Menular Kusta	1,63 per 10.000 Penduduk	1 per 10.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Menular Pneumonia Balita	11 per 1.000 Balita	2 per 1.000 Balita
		Angka Kesakitan Penyakit Menular Hepatitis B	0,22 per 1.000 Penduduk	1 per 1.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Menular Diare	17 per 1.000 Penduduk	20 per 1.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Hipertensi	38 per 1.000 Penduduk	64 per 1.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Diabetes Melitus	10 per 1.000 Penduduk	13 per 1.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	2 per 1.000 Penduduk	0,1 per 1.000 Penduduk
		Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	64,90%	90%
		Prevalensi Stunting	22,03%	15,6%
		Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	99,76%	98%

2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	B	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Sangat Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 61,530,983,188	DAU, PAD, DBH
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 129,859,888,526	DAU, DAK, JKN, PAD, DBH
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 4,749,343,000	DAU, DAK
4	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 417,607,350	DAU, DAK
5	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 650,288,740	DAU, DAK
JUMLAH		Rp 197,208,110,804	DAU, DAK, PAD, DBH, JKN

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Polewali Mandar,

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kesehatan,

Drs. Muhammad Ilham Borahima

dr. H. Mustaman, M.M.Kes, DPK

NIP : 19711231 200604 1 057

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI
MANDAR

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	CAPAIAN 2024
1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	168 per 100.000 Kelahiran Hidup	190 per 100.000 Kelahiran Hidup
		Angka Kematian Bayi	11 per 1.000 Kelahiran Hidup	14,9 per 1.000 Kelahiran Hidup
		Angka Kesakitan Penyakit Menular TB	204 per 100.000 Penduduk	280 per 100.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Menular HIV/AIDS	0 per 1.000 Penduduk	0,12 per 1.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Menular Kusta	1 per 10.000 Penduduk	1,51 per 10.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Menular Pneumonia Balita	2 per 1.000 Balita	26 per 1.000 Balita
		Angka Kesakitan Penyakit Menular Hepatitis B	1 per 1.000 Penduduk	21 per 100.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Menular Diare	20 per 1.000 Penduduk	19 per 1.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Hipertensi	64 per 1.000 Penduduk	39 per 1.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Diabetes Melitus	13 per 1.000 Penduduk	8,2 per 1.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	0,1 per 1.000 Penduduk	1,7 per 1.000 Penduduk
		Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	90%	70,52%
		Prevalensi Stunting	15,6%	21,4%
		Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	98%	102%

2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Baik

**Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2024**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Rp
		Rp	Rp	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	61.753.413.499	61.482.340.960	99,56
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tingkat Daerah yang disusun	61.210.238	48.651.191	79,48
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	24.473.768	16.368.020	66,88
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	21.042.780	18.735.787	89,04
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	15.693.690	13.547.384	86,32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun	61.074.862.709	60.911.149.208	99,73
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	60.500.289.154	60.381.333.408	99,80
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	524.300.000	480.750.000	91,69
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	50.273.555	49.065.800	97,60
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	4.408.800	1.905.000	43,21
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4.408.800	1.905.000	43,21
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	7.733.800	0	0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dilakukan monev, evaluasi dan penilaian kerja sesuai standar dan tepat waktu	7.733.800	0	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	319.551.308	295.464.982	92,46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang tersedia	5.337.560	5.299.373	99,28
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	95.463.340	78.962.495	82,71
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	7.372.620	6.642.000	90,09
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19.592.000	19.451.000	99,28
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	7.657.890	7.405.816	96,71

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang tersedia	3.196.800	3.180.000	99,47
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	28.810.050	28.799.950	99,96
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang dilayani	11.568.480	9.644.291	83,37
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Disediakan	140.552.568	136.080.057	96,82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	185.806.180	150.750.230	81,13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	185.806.180	150.750.230	81,13
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	99.840.464	74.420.349	74,54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	65.947.784	50.102.279	75,97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18.703.500	9.207.260	49,23
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15.189.180	15.110.810	99,48
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana, dan prasarana dan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	152.127.598.218	82.335.294.105	54,12
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	20.820.088.583	16.551.460.921	79,50
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10.285.877.800	10.201.616.046	99,18
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	231.563.568	228.063.568	98,49
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	3.246.020.000	2.479.072.734	76,37
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	831.265.760	815.804.000	98,14
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pemeliharaan rutin dan berkala	62.549.000	0	0,00
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman yang disediakan	6.099.175.255	2.792.717.373	45,79

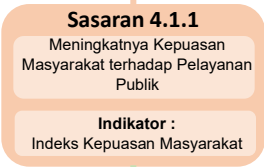
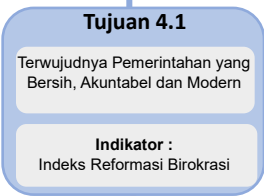
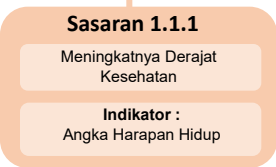
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman yang didistribusi ke fasilitas kesehatan	63.637.200	34.187.200	53,72
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kabupaten	131.062.333.217	65.679.828.019	50,11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	211.027.000	129.396.200	61,32
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas kategori miskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	226.001.000	116.812.400	51,69
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	276.444.000	243.936.000	88,24
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Anak Balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	100.000.500	82.056.600	82,06
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	99.999.680	76.991.000	76,99
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.024.100	85.644.400	85,62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	149.463.490	35.932.300	24,04
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penduduk dengan hipertensi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	99.999.800	98.169.336	98,17
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penduduk dengan diabetes melitus yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	473.445.460	81.676.096	17,25
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang diberikan pelayanan kesehatan standar	99.999.800	52.870.402	52,87
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah penduduk terduga TB yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	570.628.990	68.234.773	11,96
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah penduduk berisiko terkena HIV/AIDS yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	99.999.966	87.350.186	87,35
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	231.256.384	128.279.460	55,47
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	201.793.526	30.933.600	15,33
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	570.068.466	429.989.200	75,43

Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	320.413.000	206.956.494	64,59
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan	97.783.140	96.626.140	98,82
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.053.121.316	500.155.052	47,49
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	103.978.349.934	93.538.746.524	89,96
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	19.708.631.648	15.907.490.389	80,71
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.545.280.000	867.843.375	56,16
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	209.823.566	13.335.000	6,36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	89.129.100	63.647.600	71,41
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	49.999.765	45.659.713	91,32
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	313.227.606	149.025.490	47,58
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	111.623.980	41.996.273	37,62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	74.798.000	0	0,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Tipe C dan D yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	245.176.418	104.005.165	42,42
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer	49.823.480	36.413.365	73,08
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	117.048.738	42.575.300	36,37
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	78.304.200	25.016.500	31,95
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga medis yang memenuhi standar kompetensi	4.596.980.470	3.926.129.781	85,41
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga medis yang memenuhi standar kompetensi	3.365.009.400	2.777.684.569	82,55

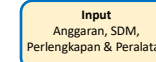
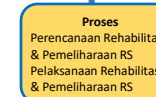
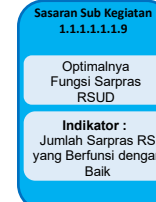
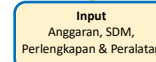
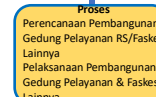
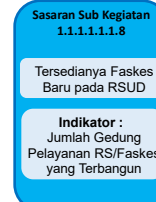
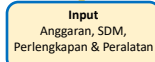
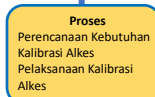
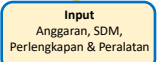
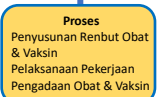
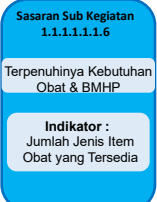
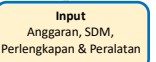
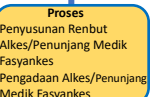
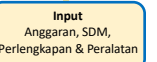
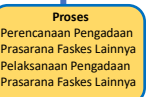
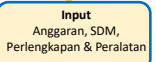
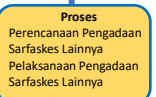
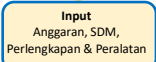
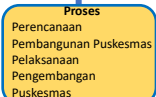
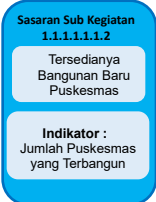
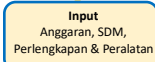
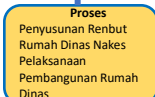
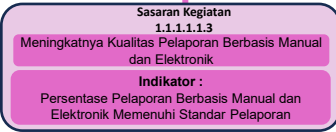
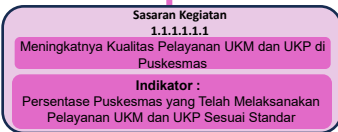
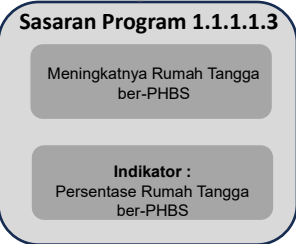
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	3.365.009.400	2.777.684.569	82,55
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berSTR (Tenaga Medis)	1.231.971.070	1.148.445.212	93,22
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.231.971.070	1.148.445.212	93,22
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Alat Kesehatan)	423.053.750	368.392.695	87,08
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga produk makanan dan minuman yang memiliki izin	423.053.750	368.392.695	87,08
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	423.053.750	368.392.695	87,08
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	708.028.740	545.076.630	76,99
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan Rumah Tangga ber PHBS	214.516.040	175.936.660	82,02
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	164.954.840	140.041.660	84,90
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	49.561.200	35.895.000	72,43
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan UKBM	493.512.700	369.139.970	74,80
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	493.512.700	369.139.970	74,80



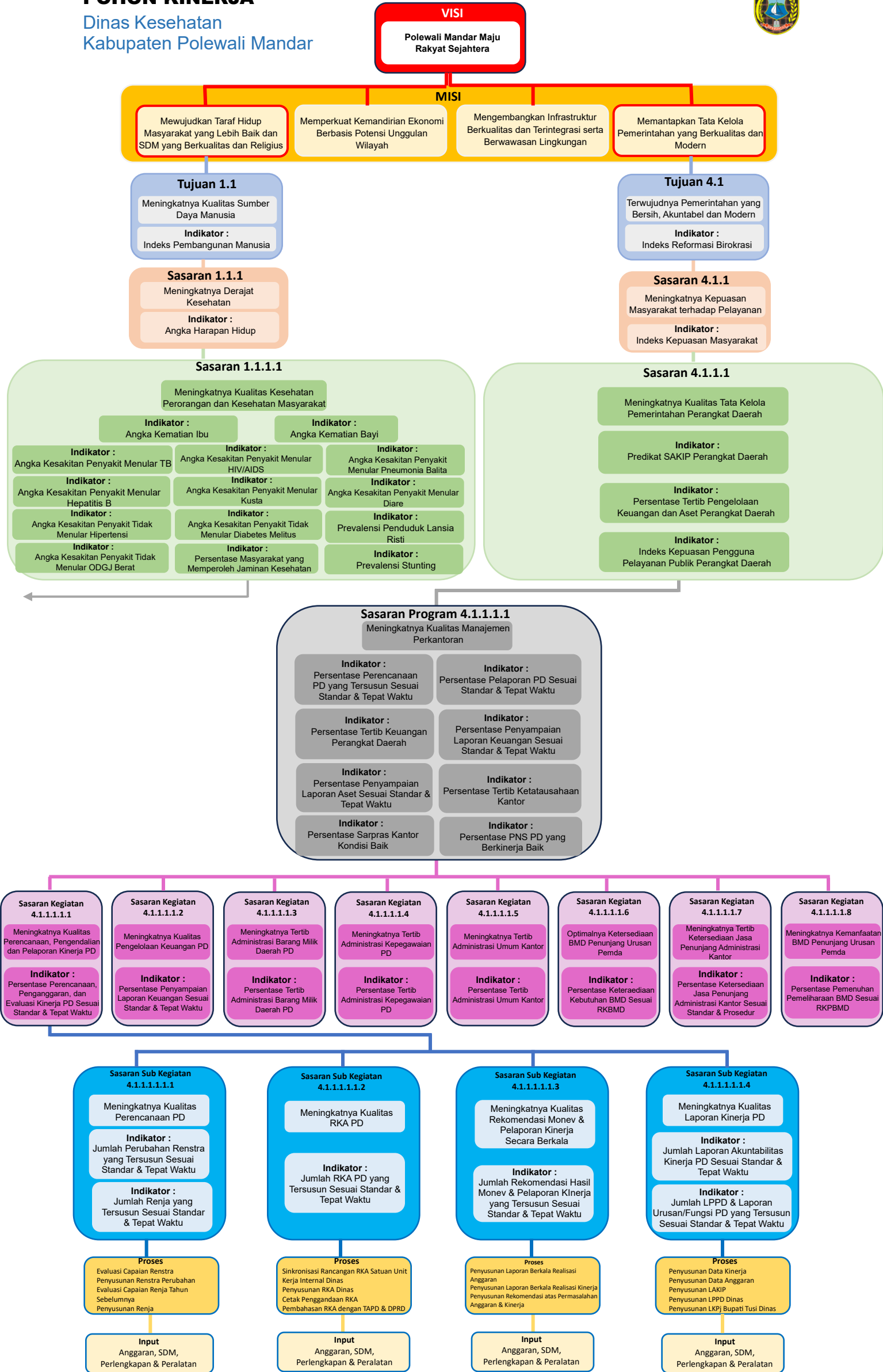
VISI
Polewali Mandar Maju
Rakyat Sejahtera



ke Halaman Selanjutnya



POHON KINERJA
Dinas Kesehatan
Kabupaten Polewali Mandar



**LAPORAN MONEV RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Strategi	CAPAIAN TRIWULAN				JUMLAH
							I	II	III	IV	
1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	per 100.00 KH	168 per 100.000 Kelahiran Hidup	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terpadu, Bermutu dan Terjangkau	190 per 100.000 Kelahiran Hidup	190 per 100.000 Kelahiran Hidup	190 per 100.000 Kelahiran Hidup	190 per 100.000 Kelahiran Hidup	190 per 100.000 Kelahiran Hidup
		Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	11 per 1.000 Kelahiran Hidup	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terpadu, Bermutu dan Terjangkau	14,9 per 1.000 Kelahiran Hidup	14,9 per 1.000 Kelahiran Hidup	14,9 per 1.000 Kelahiran Hidup	14,9 per 1.000 Kelahiran Hidup	14,9 per 1.000 Kelahiran Hidup
		Angka Kesakitan Penyakit Menular TB	per 100.000 penduduk	204 per 100.000 Penduduk	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terpadu, Bermutu dan Terjangkau	280 per 100.000 Penduduk	280 per 100.000 Penduduk	280 per 100.000 Penduduk	280 per 100.000 Penduduk	280 per 100.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Menular HIV/AIDS	per 1.000 penduduk	0 per 1.000 Penduduk	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terpadu, Bermutu dan Terjangkau	0,12 per 1.000 Penduduk	0,12 per 1.000 Penduduk	0,12 per 1.000 Penduduk	0,12 per 1.000 Penduduk	0,12 per 1.000 Penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Menular Kusta	per 10.000 penduduk	1 per 10.000 Penduduk	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terpadu, Bermutu dan Terjangkau	1,51 per 10.000 Penduduk	1,51 per 10.000 Penduduk	1,51 per 10.000 Penduduk	1,51 per 10.000 Penduduk	1,51 per 10.000 Penduduk

Angka Kesakitan Penyakit Menular Pneumonia Balita	per 1.000 Balita	2 per 1.000 Balita	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terpadu, Bermutu dan Terjangkau	26 per 1.000 Balita	26 per 1.000 Balita	26 per 1.000 Balita	26 per 1.000 Balita	26 per 1.000 Balita
Angka Kesakitan Penyakit Menular Hepatitis B	per 100.000 penduduk	1 per 1.000 Penduduk	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terpadu, Bermutu dan Terjangkau	21 per 1.000 Penduduk	21 per 1.000 Penduduk	21 per 1.000 Penduduk	21 per 1.000 Penduduk	21 per 1.000 Penduduk
Angka Kesakitan Penyakit Menular Diare	per 1.000 penduduk	20 per 1.000 Penduduk	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terpadu, Bermutu dan Terjangkau	19 per 1.000 Penduduk	19 per 1.000 Penduduk	19 per 1.000 Penduduk	19 per 1.000 Penduduk	19 per 1.000 Penduduk
Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Hipertensi	per 1.000 penduduk	64 per 1.000 Penduduk	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terpadu, Bermutu dan Terjangkau	39 per 1.000 Penduduk	39 per 1.000 Penduduk	39 per 1.000 Penduduk	39 per 1.000 Penduduk	39 per 1.000 Penduduk
Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Diabetes Melitus	per 1.000 penduduk	13 per 1.000 Penduduk	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terpadu, Bermutu dan Terjangkau	8,2 per 1.000 Penduduk	8,2 per 1.000 Penduduk	8,2 per 1.000 Penduduk	8,2 per 1.000 Penduduk	8,2 per 1.000 Penduduk
Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	per 1.000 penduduk	0,1 per 1.000 Penduduk	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terpadu, Bermutu dan Terjangkau	1,7 per 1.000 Penduduk	1,7 per 1.000 Penduduk	1,7 per 1.000 Penduduk	1,7 per 1.000 Penduduk	1,7 per 1.000 Penduduk

		Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	%	90%	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terpadu, Bermutu dan Terjangkau	71%	71%	71%	71%	71%
		Prevalensi Stunting	%	15.60%	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terpadu, Bermutu dan Terjangkau	21.40%	21.40%	21.40%	21.40%	21.40%
		Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	%	98%	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terpadu, Bermutu dan Terjangkau	102%	102%	102%	102%	102%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	Predikat	BB	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	B	B	B	B	B
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	%	100%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Predikat	Sangat Baik	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

SISTEM INFORMASI KINERJA INTEGRATED

Evaluasi Mandiri

Tahun

2024



NO	KOMPONEN		NILAI	HASIL
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)				
I	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)			
	a	PEMENUHAN RENSTRA (2%)		
	1	Renstra SKPD telah disusun	<div>Y</div>	<div>1</div>
	2	Renstra telah memuat tujuan	<div>Y</div>	<div>1</div>
	3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)	<div>A</div>	<div>1</div>
	4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya	<div>A</div>	<div>1</div>
	5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran	<div>Y</div>	<div>1</div>
	6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran	<div>A</div>	<div>1</div>
	7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	<div>A</div>	<div>1</div>
	8	Renstra telah menyajikan IKU	<div>A</div>	<div>1</div>
	9	Renstra telah dipublikasikan	<div>Y</div>	<div>1</div>
				<div>9</div>
Nilai A.I.a				<div>2</div>
	b	KUALITAS RENSTRA (5%)		
	10	Tujuan telah berorientasi hasil	<div>A</div>	<div>1</div>

	11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	A ▼	1
	12	Sasaran telah berorientasi hasil	A ▼	1
	13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A ▼	1
	14	Target kinerja ditetapkan dengan baik	A ▼	1
	15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan	A ▼	1
	16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD	A ▼	1
	17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan	A ▼	1
				8
Nilai A.I.b				5
c	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)			
	18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	A ▼	1
	19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	A ▼	1
	20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	A ▼	1
				3
Nilai A.I.c				3
Nilai A.I				10
II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)			
a	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)			
	1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun	Y ▼	1
	2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	Y ▼	1
	3	PK telah menyajikan IKU	A ▼	1
	4	PK telah dipublikasikan	Y ▼	1

				4
Nilai A.II.a				4
b	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)			
5	Sasaran telah berorientasi hasil	A	▼	1
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	▼	1
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	A	▼	1
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	A	▼	1
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai	A	▼	1
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra	A	▼	1
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	A	▼	1
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada	Y	▼	1
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	A	▼	1
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	Y	▼	1
				10
Nilai A.II.b				10
c	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)			
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	Y	▼	1
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	A	▼	1
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	A	▼	1
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	A	▼	1
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV	A	▼	1

				5
Nilai A.II.c				6
Nilai A.II				20
Nilai A				30
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)				
I	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)			
	1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	Y ▼	1
	2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya	A ▼	1
	3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	A ▼	1
	4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan	Y ▼	1
				4
Nilai B.I				5
II	KUALITAS PENGUKURAN (12.5%)			
	5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik	A ▼	1
	6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	A ▼	1
	7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP	A ▼	1
	8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A ▼	1
	9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya	A ▼	1
	10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya	A ▼	1
	11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang	A ▼	1
	12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	A ▼	1
	13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	Y ▼	1

	14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi	Y ▼	1
				10
Nilai B.II				12.5
III	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7.5%)			
	15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	A ▼	1
	16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	A ▼	1
	17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya	A ▼	1
	18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment	A ▼	1
	19	IKU telah direviu secara berkala	A ▼	1
	20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	A ▼	1
				6
Nilai B.III				7.5
Nilai B				25
C. PELAPORAN KINERJA (15%)				
I	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)			
	1	Laporan Kinerja telah disusun	Y ▼	1
	2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	Y ▼	1
	3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website	Y ▼	1
	4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	A ▼	1
				4
Nilai C.I				3
II	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7.5%)			
	5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome	A ▼	1

	6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	A ▾	1
	7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	A ▾	1
	8	Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan	A ▾	1
	9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	A ▾	1
	10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	A ▾	1
	11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	A ▾	1
				7
Nilai C.II				7.5
III	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4.5%)			
	12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	Y ▾	1
	13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	A ▾	1
	14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	A ▾	1
	15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	A ▾	1
	16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	A ▾	1
				5
Nilai C.III				4.5
Nilai C				15
D. EVALUASI INTERNAL (10%)				
I	PEMEMUHAN EVALUASI (2%)			
	1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	Y ▾	1
	2	Evaluasi program telah dilakukan	Y ▾	1
	3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	A ▾	1

	4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	A ▾	1
				4
Nilai D.I				2
II	KUALITAS EVALUASI (5%)			
	5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	B ▾	0.75
	6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	B ▾	0.75
	7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	B ▾	0.75
	8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	A ▾	1
	9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	A ▾	1
	10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode	A ▾	1
				5.25
Nilai D.II				4.38
III	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)			
	11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	A ▾	1
	12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	B ▾	0.75
				1.75
Nilai D.III				2.63
Nilai D				9.01
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)				
I	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)			
	1	Target dapat dicapai	B ▾	2
	2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	A ▾	1.5
	3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	A ▾	3

				6.5
Nilai E.I				6.5
II	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12.5%)			
	4	Target dapat dicapai	B ▾	3
	5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	A ▾	4
	6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	A ▾	4
				11
Nilai E.II				11
Nilai E				17.5
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				96.51

Submit

|

Batal (<https://simkinerja.polmankab.go.id/Reviu/mandiri>)